

## IDENTITAS BUDAYA DAN SEJARAH SUKU BAJO DI BAJO PULAU PASCANOMADEN

**Aziz Ali Haerulloh**

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran

E-mail: aziz.alihaerulloh30@gmail.com

**Siti Lilik Nurrohmah**

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran

E-mail: sitililiknurrohmah230@gmail.com

**Muhamad Alim**

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran

E-mail: muhamadiemfalah@gmail.com

**Taufik Ampera**

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran

E-mail: taufik.ampera@unpad.ac.id

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui identitas budaya dan sejarah suku Bajo yang menetap di Bajo Pulau. Bajo Pulau identik dengan budaya bahari dan suku Bajo sebagai penduduknya telah dikenal dalam sejarah sebagai suku nomaden laut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang memiliki empat tahapan kerja yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Artikel ini menyimpulkan bahwa identitas budaya suku Bajo telah mengalami pergeseran akibat kontak langsung dengan budaya daratan yang mempengaruhi suku Bajo untuk mulai hidup menetap di sebuah pulau setelah Kesultanan Bima bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1945. Pergeseran pola hidup masyarakat dari budaya bahari ke semi daratan ditandai dengan penurunan kesadaran generasi muda akan kearifan lokal yang dimiliki. Hegemoni daratan terhadap budaya melaut suku Bajo mempengaruhi perubahan cara penangkapan ikan menjadi semakin eksploitatif sehingga merusak ekosistem lautan.

**Kata kunci:** Suku Bajo, Bajo Pulau, sejarah, identitas budaya, nomaden

### Abstract

*This article aims to find out the cultural and historical identity of the Bajo tribe who have settled in Bajo Pulau. Bajo Pulau is unique as an area that represents the maritime culture and history of the Bajo tribe known as the sea nomadic tribe which has started living a few decades back. The research method is a historical method that has four stages of work namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. This article concludes that the cultural identity of the Bajo tribe has undergone a shift due to direct contact with the mainland culture which*

Haerulloh dkk.

*influenced the Bajo tribe to start living permanently on an island after the Sultanate of Bima joined the Republic of Indonesia at 1945. The shifting of people's life patterns from maritime culture to semi-mainland is marked by the decreasing level of awareness of the younger generation such as not too many are interested in profiting with maritime culture accompanied by the fading of local wisdom to preserve the carrying capacity of the environment because the culture of fishing is destructive and unsustainable.*

**Keywords:** Bajo tribe, Bajo Island, history, cultural identity, nomadic

## I. PENDAHULUAN

Penulisan artikel ini ditujukan untuk membedah asal-usul identitas dan sejarah suku Bajo di Desa Bajo Pulau pasca nomaden dengan menggunakan metode sejarah. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui unsur pembentuk identitas budaya dan sejarah suku Bajo yang berada di Bajo Pulau. Selain itu, artikel ini berusaha menguak pergeseran identitas dan budaya suku Bajo di Bajo Pulau yang telah hidup menetap sejak Kesultanan Bima menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 22 November 1945.

Bajo Pulau adalah sebuah desa di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis Bajo Pulau terletak di wilayah Kepulauan Sunda Kecil. Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara ialah gugusan pulau di sebelah timur Pulau Jawa, membentang dari Pulau Bali di sebelah barat hingga Pulau Timor di sebelah timur (*The Nature Conservancy*, 2019). Kepulauan Sunda Kecil memiliki luas pulau sebesar 73.070,48 km<sup>2</sup> (Badan Pusat Statistik, 2019). Selain itu Bajo Pulau khususnya, terletak di tengah-tengah kawasan segitiga terumbu karang (*coral triangle*). Segitiga terumbu karang adalah istilah yang merujuk kepada kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia dan seringkali disebut sebagai "Pusat dari Keanekaragaman Hayati Dunia" oleh berbagai peneliti di seluruh dunia (*The Nature Conservancy*, 2019). Penduduk asli dan paling banyak di Bajo Pulau ialah suku Bajo. Suku Bajo merupakan salah satu suku yang menjadikan laut sebagai sumber utama mata pencaharian hidup mereka. Suku Bajo tersebar di kawasan Asia Tenggara (Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Filipina). Selain disebut sebagai suku Bajo mereka juga sering dipanggil suku laut, sebutan lain untuk orang Bajo adalah orang *Luwaaqan*, *Turijene*, *Sama*, *Palaquan*, dan *Pala'u* (Kurais, 2016).

Itulah alasan mengapa desa ini dinamai dengan nama suku Bajo, karena mayoritas penduduknya adalah suku laut nomaden yang sudah mulai hidup menetap di daerah batu karang-pesisir laut. Jadilah nama desa tersebut Bajo Pulau, kondisi topografi di desa ini berbukit-bukit dan desa ini berdiri di atas batu karang besar yang membentuk gugusan pulau-pulau. Dua pulau, di Desa Bajo Pulau diberi nama Nisa Bajo dan Nisa Nae serta terbagi ke dalam tiga dusun. Dusun Bajo Barat dan Bajo Tengah di Nisa Bajo dan Dusun Pasir Putih di Nisa Nae (Nufus, 2015). Selain suku Bajo, terdapat pula suku Jawa, Minahasa, Gorontalo, Bugis, Bolaang Mongondow, Buton, dan Ternate yang tinggal di Desa Bajo Pulau. Mayoritas masyarakat Desa Bajo Pulau beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari konteks historis persebaran Islam di Nusantara bagian tengah dengan Makassar sebagai pusat penyebarannya. Bajo Pulau termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Bima.

Ruma-ta Mabata Wadu dilantik sebagai Sultan yang pertama di Bima pada tanggal 15 *Rabi'ul Awwal* 1050 H atau 1641 M. Rumata Mabata Wadu bergelar Sultan dengan nama Islam Abdul Qahir. Menurut Syarifuddin Jurdi (2011) dalam (Kurais, 2016) Bima merupakan daerah kerajaan Islam yang berdiri pada tanggal 5 Juli 1641 M. Hal ini bersamaan dengan penobatan Sultan Abdul Qahir sebagai Sultan Bima yang pertama dan memimpin pemerintahannya berdasarkan syari'at Islam.

Permasalahan yang muncul dari hasil studi lapangan adalah adanya pergeseran budaya suku Bajo yang dikenal sebagai suku nomaden laut menjadi suku yang mulai hidup menetap di suatu daerah (pulau), di era antroposen ini. Antroposen merupakan masa ketika aktivitas manusia mulai memiliki pengaruh dominan secara global terhadap ekosistem bumi, tidak terkecuali suku Bajo. Suku Bajo di Bajo Pulau sudah terpengaruh oleh budaya daratan yang bercorak agraris dan hidup menetap sehingga pola kehidupan mereka pun berpindah dari perahu yang semula menjadi (rumah) sekaligus alat transportasi ke rumah semi permanen dan permanen di daratan (pulau).

Tinjauan atas studi terdahulu, *pertama* buku *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17* (2017) karya Adrian B. Lopian. Buku ini membahas jalan dan pusat-pusat pelayaran, pemilik modal pelayaran dan perdagangan, pelaksana pelayaran dan perdagangan, jenis barang ekspor dan impor. Perbedaan buku ini dengan artikel penulis adalah fokus kajiannya, buku ini membahas pelayaran dan perniagaan di Nusantara abad ke 16 dan 17 secara umum sedangkan penulis berupaya mengkaji sejarah mikro dari dunia pelayaran dan perniagaan di Nusantara yang dialami oleh suku Bajo yang kelak mendiami suatu pulau di ujung timur Bima. Buku ini memberikan sumbangan pengetahuan akan rute pelayaran dan pusat-pusat pelayaran dan perdagangan, salah satunya pelabuhan Bima dan sekitarnya yang nanti akan menjadi jalur masuk suku Bajo ke Pulau Sumbawa Besar.

*Kedua*, artikel *Nama Rupabumi, Toponim, Aturan dan Kenyataan* (2015) karya Asadi. Artikel ini membahas pengaruh manusia dan kebudayaan dalam pemberian nama rupabumi baik berunsur alami, buatan, maupun fisiografis. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2006, dibentuk Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi menjadi Lembaga yang berwenang menetapkan nama rupabumi. Pembuatan regulasi terkait rupabumi ini didasarkan pada minimnya pengetahuan masyarakat dalam memahami pentingnya penamaan rupabumi dan toponimi dalam suatu negara. Perbedaan artikel ini dengan artikel penulis adalah terletak dari ruang lingkup kajiannya, artikel ini membahas tentang penamaan rupabumi dan toponim secara makro (keindonesiaan) sedangkan penulis mengkaji suatu ruang lingkup yang lebih spesifik di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bima, Kecamatan Sape, tepatnya di Desa Bajo Pulau. Artikel ini memberi sumbangan pengetahuan bagaimana kesadaran dalam penamaan rupabumi juga bisa terlahir dari identitas budaya dan sejarah penduduk suatu daerah. Penulis akan mengungkapkan bagaimana suku Bajo dapat mendiami dua gugusan pulau karang yang kemudian dinamakan Bajo Pulau.

*Ketiga*, artikel *Identifikasi Pulau di Daerah Perbatasan Berdasarkan Kaidah Toponimi* karya Yulius (2009). Artikel ini membahas daerah yang belum terdaftar di Departemen Dalam Negeri, sekaligus memetakan posisi suatu pulau yang belum teridentifikasi dengan *Global Positioning System* (GPS), dan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam mengelola daerah perbatasan dengan negara lain.

Haerulloh dkk.

Perbedaan artikel ini dengan artikel penulis adalah terletak dari tujuannya, artikel ini bertujuan mengidentifikasi suatu daerah yang belum terdaftar sedangkan penulis dalam artikelnya bertujuan untuk menelusuri identitas budaya dan historisitas suku Bajo yang berdiaspora ke wilayah Bima dengan memperlihatkan pergeseran pola hidup dari suku nomaden laut menjadi suku pasca nomaden (menetap). Hal ini dibuktikan dengan adanya gugusan pulau-pulau di timur Bima yang diberi nama Bajo Pulau sesuai dengan suku yang menghuni pulau tersebut.

Keempat, dalam buku berjudul *Islam di Bima Implementasi Hukum Islam Oleh Badan Hukum Syara Kesultanan Bima: 1947-1960* (2013) karya Muhammad Mutawalli. Buku ini membahas secara rinci terkait kondisi sosial, ekonomi, hingga politik Kesultanan Bima pasca kemerdekaan. Sejak dikeluarkannya maklumat Kesultanan Bima tanggal 22 November 1945, secara hukum Kesultanan Bima menjadi bagian dari NKRI. Bergabungnya Kesultanan Bima ini dilatar belakangi oleh kepercayaan Kesultanan Bima pada penegakan hukum Islam yang mendominasi NKRI. Diakuinya Kesultanan Bima ke dalam NKRI merupakan langkah awal Kesultanan Bima keluar dari hegemoni Belanda yang masih lekat. Buku ini dapat memperkaya sumber dalam penelitian ini terkait kondisi Kesultanan Bima pada 1947-1960.

Kelima, artikel berjudul *Kebangkitan Identitas Orang Bajo di Kepulauan Wakatobi* (2013) karya Tasrifin Tahara. Artikel ini memberikan pengertian pada masyarakat luas terkait entitas suku Bajo sebagai salah satu suku bangsa yang beragam bukan hanya sebatas pemberontak karena stereotip yang telah melekat pada mereka sejak dulu. Selain itu, artikel ini juga membahas bagaimana perubahan kondisi sosial-budaya (pandangan hidup) suku Bajo di Wakatobi pada saat menetap. Masalah tersebut muncul dilatar belakangi oleh kurangnya pengetahuan umum yang dikuasai oleh masyarakat Bajo. Orang-orang Bajo cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dengan pemberian label sebagai suku yang terbelakang dan memiliki masa lalu sebagai seorang perompak (oleh sebagian orang), menjadikan suku Bajo semakin terbelakang dan jauh dari jangkauan masyarakat umum.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dan fakta adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan kerja. Heuristik, dilakukan untuk mengumpulkan sumber pustaka dan keterangan dari penduduk setempat secara lisan. Kritik, digunakan untuk mengkritisi sumber-sumber sejarah dengan cara dikoroborasikan dengan sumber lainnya. Interpretasi, adalah menafsirkan data dan fakta hasil kritik, dan historiografi adalah menuliskannya dalam bentuk tulisan sejarah. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan instrumen penelitian berupa studi pustaka, studi lapangan (observasi), dan wawancara langsung.

Konsep yang penulis gunakan adalah identitas budaya untuk mengetahui bagaimana proses perubahan budaya salah satunya gaya hidup suku Bajo yang sebelumnya hidup nomaden hingga menetap secara semi permanen dan permanen di suatu pulau.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan di antaranya:

1. Mengetahui identitas budaya dan sejarah suku Bajo yang telah hidup menetap di Bajo Pulau.

2. Menelusuri jejak sejarah suku Bajo di wilayah Sumbawa Besar dan penyebaran Islam di Bima.
3. Menggambarkan pergeseran pola hidup masyarakat Bajo Pulau.

Kegiatan Ekspedisi Nusantara Jaya (ENJ) 2018 yang bekerja sama antara Universitas Padjadjaran dengan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, bertujuan untuk membangun daerah yang termasuk kategori 3-T (tertinggal, terdepan, dan terluar) di Indonesia melalui program Tri Dharma Perguruan Tinggi. Melalui artikel ini, penulis sebagai salah satu anggota TIM ENJ Universitas Padjadjaran 2018 berusaha untuk mengembangkan Desa Bajo Pulau di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan membangun kesadaran masyarakat setempat terhadap identitas budaya dan sejarahnya.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Identitas Budaya**

Membahas identitas budaya etnisitas di Indonesia tentu harus dimulai dengan membahas identitas budaya Indonesia terlebih dahulu. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, namun Indonesia belum bisa disebut sebagai negara maritim karena dinilai belum mampu memanfaatkan dan menjaga laut untuk menyejahterakan rakyatnya (Wangke, 2019). Hal ini disebabkan oleh masih bertumpunya perekonomian nasional pada bidang agrikultur dibandingkan akuakultur.

Identitas budaya yang terdapat dalam suku Bajo di Bajo Pulau memperlihatkan budaya maritim mereka lebih dominan dengan memanfaatkan sumber daya bahari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibandingkan sumber daya alam di daratan. Bahkan pemukiman mereka dibangun menjorok ke arah lautan, tempat mereka mencari sumber penghidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya yang ada di darat kurang teroptimalisasi, disebabkan budaya melaut telah mengakar pada suku Bajo dan sudah berlangsung sejak masa Kerajaan Sriwijaya hingga Kesultanan Bima bergabung dengan NKRI pada 1945. Menurut Liliweri (2002) dalam (Baskara, 2011) bentuk identitas ada tiga macam, yaitu identitas pribadi, identitas sosial, dan identitas budaya. Identitas budaya adalah karakteristik yang muncul karena seseorang itu merupakan anggota sebuah suku bangsa atau kelompok budaya tertentu.

Menurut Sudirman Saad (2011) dalam (Kurais, 2016) secara leksikal Bajo dalam bahasa *Lamaholot*<sup>1</sup> artinya mendayung perahu. Masyarakat Bajo, di Bajo Pulau menghabiskan sebagian besar waktunya di pesisir laut baik untuk berternak ikan Kerapu maupun Lobster dalam sistem keramba. Rumah masyarakatnya berupa rumah tradisional khas masyarakat pesisir (rumah panggung) yang memiliki kolong. Kolong biasanya digunakan untuk tempat istirahat, bercengkerama dengan tetangga atau sebagai tempat kosong apabila air laut sedang pasang rumah mereka tidak terkena air. Saat ini julukan bagi suku laut nomaden (*sea nomadic*) bagi suku Bajo yang berada di Bajo Pulau sudah tidak relevan lagi.

---

<sup>1</sup>Lamaholot adalah salah satu suku bangsa yang berdiam di dalam wilayah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Keterangan lebih lanjut baca: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbali/kekuatan-budaya-lamaholot-dalam-pembentukan-karakter-dan-identitas-masyarakat-flores-timur-di-masa-depan/>



Foto. 1 Lanskap Dusun Bajo Tengah (Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018)

Salah satu kebiasaan masyarakat Bajo Pulau adalah membuat sya'ir dan bersya'ir. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan nenek moyang mereka suku Bajo yang berasal dari daerah Melayu di Selat Malaka. Meskipun sya'ir dibuat dan dilantunkan dalam bahasa Bajo/Bima, namun kebiasaan itu telah menjadi identitas budaya suku Bajo yang terpengaruh oleh budaya Melayu. Secara historis nenek moyang mereka adalah panglima armada laut Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Malaka. Maka tidak heran apabila pengaruh budaya bersya'ir juga terdapat di suku Bajo yang berada di Bajo Pulau (Kurais, 2016).

Selain bersya'ir suku Bajo juga mengenal beberapa pantangan, mereka umumnya menjauhi pantangan untuk menghindari marabahaya di lautan seperti dilarang mengucapkan kata-kata tidak sopan, *takabur*, membawa jeruk nipis dan membuang abu dapur ke laut. Suku Bajo mengenal upacara *sangkina* (kehamilan), upacara *campaniga* (kelahiran), upacara sunatan, upacara perkawinan, upacara *mattula bala'* (menolak bahaya), upacara turun ke laut, upacara pelepasan perahu baru, dan upacara kematian (Muhammad, 2007). Namun ada beberapa pantangan yang sudah sering dilanggar oleh suku Bajo di Bajo Pulau, seperti penggunaan bom ikan untuk menangkap ikan.

Suku Bajo di Bajo Pulau telah mengenal Islam dan mensinkretiskan<sup>2</sup> Islam dengan kepercayaan tradisional yang mereka yakini adanya dewa penjaga laut (*Mbo ma dilao*). Dewa laut ini dikenal berwatak baik hati dan penolong. Suku Bajo percaya bahwa Dewa laut ini akan memberikan hasil tangkapan ikan yang melimpah. Suku Bajo membuat mantra-mantra (*mama*) yang ditujukan pada dewa laut agar tetap tenang dan stabil (tidak murka). Salah satu mantra yang digunakan Suku Bajo ini terinspirasi dari ajaran islam.

Contoh mantra:

Mantra untuk Membuang Pukat (mempermudah proses penjaringan ikan)

*Bismillahirrahmanirrahim*

(Dengan menyebut nama Allah)

*Oh dayah Wahai Ikan Kau palikka tannu* (Engkau kembali ke tempatmu)

*Tikka ma jabal nur*

(Bertolak dari jabal nur)

*Kau nabinu nabi nun*

---

<sup>2</sup> Berasal dari kata sinkretis artinya adalah bersifat mencari penyesuaian (keseimbangan dan sebagainya) antara dua aliran (agama dan sebagainya) lihat lebih lanjut dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sinkretis>.

(Nabimu adalah Nabi Nun)

*Anu teo patutukunu*

(Yang jauh bawa mendekat)

(Uniawati, 2010)

Sinkretisme antara Islam dengan kebudayaan Bajo dapat dilihat dari tulisan Benny Baskara dalam bukunya *Islam Bajo: Agama orang laut* (2011) menyebutkan bahwa orang-orang Bajo yang telah memeluk Islam mengakulturasikan budaya Islam dengan kepercayaan asli suku Bajo. Hal ini dapat dilihat dari tata cara pernikahan dan sunatan yang dilakukan suku Bajo yang mengikuti syari'at Islam. Namun, dalam ritual kelahiran dan kematian menggunakan tradisi asli mereka.

Akulturasasi budaya Islam dengan kekayaan kearifan lokal juga terlihat dari pembuatan kain *tembe nggoli* yang ada pada masa Kerajaan Bima. Walaupun motif pada masa Kerajaan Bima masih sangat terbatas dan sederhana karena tingkat kreatifitas dan pengetahuan masyarakat terhadap kreasi dan warna tenun yang terbatas (Ardiansyah, 2019). Pembuatan kain *tembe nggoli* mempunyai peranan ekonomi yang penting pada masa Kerajaan Bima, khususnya para pedagang yang datang ke pelabuhan Bima sekitar abad ke-10 atau untuk dijual di luar daerah Bima oleh Suku Bajo ketika mereka berlayar dan berniaga di daerah lain.



Foto. 2 Sebanyak 100 penari menampilkan Tarian Kolosal mengenakan *rimpu* dari sarung tenunan khas suku Bima yang dikenal dengan nama *Tembe Nggoli* (Sumber: Laman Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019)

Ardiasnyah juga menambahkan bahwa kain *tembe nggoli* atau sarung tenun mempunyai peran praktis yang sarat dengan nilai Islam, yaitu untuk menutup aurat. Bagi perempuan Bima merupakan hal yang tabu jika aurat mereka terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya (pasangan sahnyanya). Kultur ini menurut penulis dipengaruhi oleh budaya melayu yang cukup dominan di pesisir kota Pelabuhan Bima. Menurut Elbert Johannes (1909: 10) dalam Taufiqurrahman (2012) menyimpulkan pada dasarnya orang yang tinggal di sekitar ibu kota Bima adalah ras bangsa campuran yang bertalian dengan orang-orang Bugis dan Makassar, yaitu ras bangsa Melayu Muda.

Kebiasaan masyarakat Bima yang sudah mengalami Islamisasi pada pertengahan abad ke-17 M, turut mempengaruhi gaya berpakaian suku Bajo yang memiliki hubungan erat dalam bidang perdagangan. Proses seperti itu dalam bahasa Indonesia sering disebut "pembudayaan". Dalam proses pembudidayaan, individu/masyarakat mempelajari dan menyesuaikan diri (jasmani) dan pikiran (rohani) serta sikapnya terhadap adat-istiadat, sistem norma, dan berbagai peraturan yang hidup dalam kebudayaan masyarakat setempat (Warsito, 2017).

## 2. Jejak Sejarah

Suku Bajo telah ada sejak ratusan tahun yang lalu, suku ini menyebar ke berbagai penjuru Nusantara melalui jalur pelayaran dan perdagangan serta cenderung hidup nomaden. Suku Bajo yang hidup berkelompok nomaden dipimpin oleh seorang *punggawa*, sebutan untuk pemimpin yang memiliki kebijaksanaan dan kharismatik (Kurais, 2016). Kepemimpinan suku Bajo umumnya bersifat religio-magis, jadi kekuasaan politik bersifat adiduniawi dan adimanusiawi (Suseno, 2016). Selain itu, seorang *punggawa* diyakini juga memiliki kekuatan magis untuk memimpin prosesi adat-istiadat, penyembuhan, dan sebagainya.

Suku Bajo dalam kajian etnografi kurang begitu populer dibandingkan dengan suku Bugis yang sama-sama menjadikan laut sebagai sarana mencari penghidupan. Hal ini dibuktikan dengan catatan-catatan pelayaran orang Makassar (Bugis) yang hampir meliputi seluruh perairan Nusantara (Lapian, 2017). Pembaca dapat merujuk ulasan Adrian B Lapian dalam Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke 16 dan 17 mengenai naskah hukum laut *Amanna Gappa* dan juga peta laut Bugis.

Dalam kegiatan sehari-hari suku Bajo yang cenderung hidup mobil dan dinamis ini tidak memiliki keterikatan secara khusus terhadap salah satu agama tertentu. Sejak melakukan kontak langsung seperti berdagang di pelabuhan dan dari situlah mereka mulai mengenal agama ketika mereka tunduk terhadap otoritas suatu kerajaan yang menguasai suatu wilayah perairan seperti di Selat Malaka yaitu Kerajaan Sriwijaya (7-11 M) dan Kesultanan Malaka (15-16 M) (Kurais, 2016).

Pada masa Sriwijaya (7-11 M), suku Bajo berperan sebagai pasukan laut kerajaan yang diberi tugas untuk menjaga kedaulatan maritim dan mengarahkan potensi perdagangan di wilayah kekuasaan Sriwijaya. Salah satu contohnya dengan mengarahkan kapal-kapal yang berlayar melewati wilayah teritori kerajaan untuk singgah sekaligus membayar pajak di Palembang Ibukota Kerajaan Sriwijaya. Kedigdayaan dan kesejahteraan Sriwijaya tidak bisa dilepaskan dari kontribusi Suku Bajo (Kurais, 2016). Beberapa abad lamanya Sriwijaya berperan sebagai pelabuhan samudra-pusat perdagangan (bandar transito), dan pusat kekuasaan yang menguasai pelayaran serta perdagangan di Semenanjung Malaya, Selat Malaka, Sumatra Utara, dan Selat Sunda (Leirissa, Ohorella, dan Tangkilisan, 2012).

Orang Bajo memiliki peran penting dalam sejarah pendirian Malaka. Pada awal abad ke-15 Parameswara dari Bukit Siguntang Mahameru, Palembang bekerja sama dengan Suku Bajo di Selat Malaka untuk mendirikan pemukiman awal. Sebagai balas jasa, Raja Parameswara menjadikan Orang Bajo sebagai pembesar negeri (bangsawan). Berkat bantuan Suku Bajo, Parameswara berhasil membangun Malaka sebagai pusat perdagangan internasional terutama rempah-rempah dan bahan-bahan logam (Kurais, 2016). Selaras dengan hal tersebut kejayaan Malaka sebagai pusat perdagangan melemah sejak ditalkukan oleh Portugis pada 1511. Hal ini menimbulkan kemunculan berbagai pusat perdagangan baru di Nusantara, seperti: Aceh, Demak, Gresik, dan Makassar (Leirissa, Oherella, dan Tangkilisan, 2012).

Proses Islamisasi terhadap suku Bajo diperkirakan berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Shah, yaitu keturunan pendiri Kerajaan Malaka. Hal ini menjadi bukti bahwa ketika suku Bajo berdiaspora ke wilayah Kerajaan Bima sekitar 1601, suku Bajo sudah memeluk agama Islam. Pada saat yang bersamaan Kerajaan Bima belum memeluk agama Islam. Namun identitas keislaman suku Bajo

tidak pernah digembar-gemborkan, hal ini didasarkan pada situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk menyebarkan Islam di wilayah Kerajaan Bima. Terlebih pengaruh kerajaan Hindu saat itu masih kuat seperti Kerajaan Bone (Sulawesi Selatan) yang kelak masyarakat dan raja-rajaanya memeluk agama Islam. Kerajaan Bone sendiri dikenal sebagai Kerajaan suku Bugis (Kurais, 2016).

Sebelum abad ke-17 Bima merupakan salah satu kerajaan maritim yang cukup eksis di Nusantara bagian timur. Hal ini ditunjang dengan keberadaan teluk dan pelabuhan yang berada di letak strategis dan aman dari badai. Selain itu, Bima menjadi pintu masuk ke Pulau Sumbawa bagian timur yang termasuk daerah terpenting di Kepulauan Sunda Kecil. Pada abad ke-17 pedagang Bugis-Makassar dan Melayu telah melakukan aktivitas perdagangan di Pelabuhan Bima, disusul oleh pedagang Cina dan Arab pada abad 18-19 (Taufiqurrahman, 2012).

Keberadaan teluk dan pelabuhan menjadikan salah satu proses Islamisasi di Bima adalah adanya masyarakat pendatang meliputi orang-orang dari Jawa, Bugis-Makassar, Melayu, Arab, dan Cina. Berbagai etnis pendatang ini turut mempercepat transformasi Kerajaan Bima menjadi Kesultanan Bima diantaranya berkat aktivitas yang intens dalam bidang perdagangan berimplikasi terhadap proses penyebaran Islam terutama oleh orang-orang Melayu yang datang diduga kuat beserta orang Bajo (Taufiqurrahman, 2012).

Salah satu persamaan suku Bugis dan suku Bajo adalah keduanya piawai dalam hal melaut, yang membedakannya adalah sistem sosial kemasyarakatan. Suku Bugis menetap di daratan namun mencari penghidupan dengan cara melaut sedangkan suku Bajo menetap dan mencari penghidupan di laut. Kondisi sosial Suku Bajo yang dinamis dan berubah karena tinggal nomaden ini tidak memungkinkan Suku Bajo membentuk suatu kerajaan dan pemerintahan. Namun, setelah Kesultanan Bima menggabungkan diri dengan NKRI mereka mulai hidup menetap di daratan (Kurais, 2016).

Abd Rahman Hamid (2013) dalam (Kurais, 2016) menjelaskan bahwa fungsi perahu bagi orang Bajo bukan hanya sebagai alat transportasi dan komponen paling penting untuk melaut. Di atas perahu mereka bersosialisasi, berkeluarga, berketurunan, dan menjaga kebudayaan. Perahu Masyarakat Bajo Pulau sangat beragam. Perahu bercadik biasanya digunakan untuk melaut jarak jauh, di sekitar wilayah Kepulauan Sunda Kecil. Sedangkan untuk kebutuhan transportasi laut jarak dekat hingga menengah Suku Bajo menggunakan perahu tanpa cadik.

Adanya kontak antara satu daerah dengan daerah lain selain untuk perdagangan, juga untuk kepentingan perluasan kekuasaan atau pengaruh suatu kerajaan ke daerah sekitarnya. Kesultanan Gowa dan Bone pada beberapa abad yang lalu di Kepulauan Sunda Kecil melakukan perluasan terhadap Bima yang berada di sebuah teluk. Islamisasi di Kerajaan Bima juga tidak terlepas dari pengaruh Kesultanan Gowa dan Bone di Sulawesi Selatan yang memiliki pengaruh cukup kuat di Nusantara bagian tengah. Selain itu memasuki abad ke-17 banyak kerajaan-kerajaan Hindu-Budha yang telah runtuh dan tunduk terhadap kerajaan-kerajaan Islam/VOC. Perluasan yang dilakukan VOC di bagian barat Pulau Flores ditandai dengan adanya perjanjian Bongaya pada 1667 antara VOC dan kesultanan Goa. Perjanjian ini berisi hak-hak monopoli dan dominasi VOC terhadap Kesultanan Goa (Daeng, 1985)

Terdapat beberapa kerajaan Hindu-Buddha yang berganti agama kerajaan

Haerulloh dkk.

seperti Kerajaan Bone pada masa kepemimpinan La Tenripale Matinro'E di Tallo (Raja Bone ke-12) yang memerintah pada 1608-1626 dan La Maddaremmeng Matinro'E Ri Bukaka (Raja Bone ke-13) yang memerintah pada 1626-1643 kemudian menganut agama Islam secara fanatik (Achmad, 2016). Kesultanan Gowa dan Bone ini pun memberikan pengaruh terhadap Islamnya kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Kepulauan Sunda Kecil, secara politik ada hubungan hierarkis (*patron-clients*) karena hubungan dagang, perkawinan, dan militer.

Islam menyebar dari wilayah Nusantara bagian barat melalui Kesultanan Aceh, Malaka, Banten, Cirebon, Gresik dan sebagainya hingga ke tengah melalui Kesultanan Gowa, Bone, dan lain-lain. Selain melalui jalur politik, Islam pun menyebar melalui jaringan perdagangan dan diaspora para pedagang muslim yang seringkali memiliki identitas ganda selain sebagai pedagang mereka juga adalah ulama yang turut serta menyebarkan nilai-nilai Islam ke berbagai daerah, termasuk Bima yang pada saat itu masih berupa kerajaan beragama Hindu. Diaspora ini berlangsung signifikan setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada 1511.

Kedatangan para pedagang suku Bajo dari Selat Malaka turut serta membuka peluang masuknya Islam ke Bima, suku Bajo selain memiliki kemampuan melaut juga pandai dalam berdagang hal ini dipengaruhi oleh kultur metropolis dari daerah asalnya di Kesultanan Malaka. Proses Islamisasi Bima berlangsung secara bertahap melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan ekspedisi militer Kesultanan Gowa (Haris, 2006).

### 3. Pergeseran Pola Hidup



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima, 2016

GAMBAR 1.  
PETA ADMINISTRASI KECAMATAN SAPE

Desa Bajo Pulau merupakan dua gugusan pulau kecil berpenduduk yang letaknya tidak jauh dari Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima. Pelabuhan Sape berjarak sekitar 45 km sebelah timur Kota Bima (Ekspedisi Nusantara Jaya Unpad, 2018). Selain itu, Bajo Pulau adalah salah satu desa di Kecamatan Sape yang mayoritas penduduknya etnis Bajo (suku laut), kondisi ekonomi-sosial di Bajo Pulau umumnya masyarakat berpendapatan menengah ke bawah dengan mayoritas profesi masyarakatnya sebagai nelayan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Desa Bajo Pulau setidaknya memiliki jumlah penduduk sebanyak 452 jiwa yang kondisi kesejahteraannya sampai dengan 10% terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015). Disamping menjadi nelayan tidak sedikit yang berprofesi ganda sebagai ojek laut sebutan untuk transportasi yang

menghubungkan Desa Bajo Pulau dengan Kecamatan Sape (Sudirman, 2018).

Beberapa ciri kehidupan masyarakat pesisir adalah mobilitasnya yang tinggi serta tidak terikat pada satu jenis mata pencaharian saja dan dalam aktivitas kesehariannya, masyarakat pesisir yang memiliki jiwa berdagang begitu memperhatikan segi untung-rugi. Mereka juga dikenal menjaga gengsi (harga diri) pribadi maupun kelompok (Handoyo dkk, 2015).

Mayoritas suku Bajo di Bajo Pulau sudah hidup menetap dengan memiliki rumah di pesisir laut dan di daerah Kecamatan Sape, baik rumah semi permanen atau permanen. Hal itu dimulai sejak bergabungnya Kesultanan Bima di bawah pimpinan Sultan Muhammad Salahuddin dengan NKRI pada 22 November 1945 (Mutawalli, 2013 & Bimakini, 2017). Pada awalnya mereka membuat bangunan panggung di atas gugusan pulau karang, sehingga jika dilihat rumah Suku Bajo ini semakin mendekati laut, semakin tinggi pula fondasinya. Seiring perkembangan jaman rumah-rumah panggung itu semakin banyak dan mulai membentuk dusun-dusun yang berdiri berdekatan satu sama lain disebabkan daerah tersebut landai dan relatif rata. Bentuk rumah panggung masih dipertahankan hingga kini dengan memberi ruang di bawah rumah sebagai tempat menyimpan perkakas rumah, kamar mandi, cuci, dan kakus (MCK).

Pergeseran gaya hidup suku Bajo dengan latar belakang budaya maritim menjadi masyarakat yang menetap baik secara semi permanen maupun permanen diduga kuat karena proses akulturasi dengan budaya daratan yang agraris dalam hal ini Kesultanan Bima sebagai pemilik otoritas wilayah. Bentuk akulturasi *overt culture* nampak dalam tata cara hidup baru salah satunya berternak (kambing, ayam, dan itik), serta berkembangnya tingkat pendidikan formal masyarakat pada umumnya.



Foto. 3 Pelajar SD di Desa Bajo Pulau bersama ekspeditor ENJ  
(Sumber : Dokumentasi ENJ Universitas Padjadjaran, 2018)

Dalam kepercayaan suku Bajo yang sudah hidup menetap di pulau mereka meyakini pembuatan rumah yang menghadap ke laut dapat memberikan keberkahan tersendiri bagi mereka, dan juga ikan akan datang pada mereka (Gobang dkk, 2017). Konsep *waterfront city* di suku Bajo pun untuk memudahkan masyarakat melihat pasang-surut air laut yang berkaitan dengan kemungkinan mereka melaut atau tidak pada hari itu.

Haerulloh dkk.



Foto. 4 Posisi Rumah di Pesisir Desa Bajo Pulau  
(Sumber: Dokumentasi ENJ Universitas Padjadjaran, 2018)

Nasruddin (2011) dalam (Kurais, 2016) membahas gaya hidup suku Bajo yang lebih tertarik memanfaatkan sumber daya laut. Berbanding terbalik dengan gaya hidup suku Bugis yang lebih banyak memanfaatkan sumber daya yang ada di darat. Menurut kepercayaan yang hidup di masyarakat Bajo, lingkungan laut merupakan hak yang sesungguhnya bagi mereka yang diberikan oleh Sang Dewata. Kepercayaan terhadap Sang Dewata banyak dipengaruhi pada masa kepercayaan Buddha di Sriwijaya sebelum suku Bajo di Selat Malaka berdiaspora ke Nusantara bagian tengah. Pekerjaan di darat bagi suku Bajo dengan mengelola potensi sumber daya yang ada hanya sebagai pengisi waktu luang (Kurais, 2016). Maka dari itu, sampai sekarang masyarakat Desa Bajo Pulau hampir 90% berprofesi sebagai nelayan tradisional, ojek laut, dan peternak ikan keramba.

Menurut Taufiqurrahman (2012) produksi hasil tangkapan (ikan) laut di Kabupaten Bima mencapai 946 ton per hari yang dilakukan oleh nelayan di berbagai kecamatan pesisir. Perkembangan ini diikuti pula oleh meningkatnya budidaya ikan air tawar sebagai modal untuk meningkatkan sumber penghasilan dan taraf hidup bagi masyarakat Bima.

Nelayan suku Bajo umumnya melakukan penjualan langsung komoditas teripang kepada para pedagang Tionghoa atau melalui pengepul atau tengkulak sebelum didistribusikan ke pedagang Tionghoa di daerah Kota Bima atau ke luar pulau seperti Lombok, Bali, dan Jawa. Selain dikonsumsi, teripang biasa digunakan untuk pengobatan.



Foto. 5 Teripang salah satu komoditas unggulan suku Bajo  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)

Jika diamati ada mata pencaharian baru yang muncul di kehidupan suku Bajo. Selain memanfaatkan laut sebagai sumber utama, suku Bajo pasca nomaden juga mulai berternak meskipun orientasinya untuk dikonsumsi sendiri. Hal tersebut bermula ketika suku Bajo mulai hidup menetap secara permanen. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sudirman (27 Juli 2018), selaku Kepala Dusun Bajo Barat, masyarakat Bajo pada umumnya berternak kambing. Hampir setiap penduduk yang mempunyai penghasilan lebih menginvestasikannya dalam bentuk hewan ternak. Menjelang Idul Adha masyarakat Bajo tidak menjual kambingnya keluar daerah, tetapi lebih memilih untuk dijadikan sembelihan *aqiqah* dan *qurban* serta kebutuhan konsumsi warga sekitar.

Pergeseran juga terjadi antargenerasi, terdapat kontradiksi dengan kebiasaan masyarakat terutama generasi muda yang sudah banyak yang beralih profesi, salah satu bukti dari pergeseran pola hidup masyarakat. Semula remaja laki-laki yang diperkirakan tamatan SMA sederajat sudah ikut serta melaut untuk membantu orang tua dalam mencari nafkah, saat ini mulai berkurang karena ekosistem laut yang telah rusak disebabkan oleh alat tangkap ikan yang merusak (bom ikan) dan *overfishing*.

Nyatanya jauh sebelum dikenal bahan kimia penyusun bom ikan untuk menangkap ikan dalam jumlah besar, suku Bajo menangkap ikan dengan menggunakan alat-alat tradisional seperti kail, jaring, pukot, pancing dengan mata pancing yang berjumlah 10, sumpit, tombak dan lain-lain. Namun seiring dengan berkembangnya zaman permintaan akan ikan sebagai sumber protein bagi masyarakat pun meningkat hal ini yang melatarbelakangi penggunaan bom ikan dikalangan suku Bajo untuk memenuhi jumlah permintaan pasar.

Jauh sebelum suku Bajo hidup menetap mereka terbiasa menangkap ikan dengan cara menggunakan alat-alat sederhana. Mereka pun menangkap ikan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi dan dijual dalam jual terbatas berdasarkan sisa hasil konsumsi. Sistem jual belinya pun masih menggunakan sistem barter, setelah hidup menetap dan mengenal uang rupiah pada dekade 1950-an sebagai satuan alat tukar yang sah di Indonesia mereka pun bertransformasi dalam hal cara menangkap ikan, orientasi komersial, pembukuan untung-rugi, dan eksploitasi sumber daya alam demi mencapai target produksi sesuai dengan permintaan pasar dan keuntungan.

Kerusakan ekosistem laut tidak hanya disebabkan oleh cara tangkap ikan yang berbahaya dan tidak berkelanjutan, tetapi juga sampah kiriman dari daerah lain maupun lokal dari masyarakat Bajo Pulau. Berdasarkan data yang dirilis dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tercatat 150 juta ton sampah plastik berada di lautan dunia. Hal ini akan terus meningkat hingga mencapai 250 juta ton apabila sistem produksi, konsumsi, dan urbanisasi terus berlanjut. Sebesar 50% sampah yang berada di lautan merupakan tanggung jawab lima negara dari 192 negara penghasil sampah terbesar, salah satunya Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 2018).

Sebagai suku nomaden, sebelum hidup menetap orang Suku Bajo memiliki kecenderungan hidup sederhana. Mereka memiliki tinggalan budaya yang sedikit karena keterbatasan ruang, di mana perahu menjadi rumah sekaligus alat

transportasi utama. Namun, setelah hidup menetap mereka mulai mengadopsi kebudayaan daratan. Berbagai macam barang elektronik dan barang pemuas kebutuhan lainnya seperti perhiasan, surat-surat berharga, tabungan (deposito, haji, giro, dan emas) serta alat kekayaan bergerak dan tidak bergerak lainnya. Perubahan cara hidup yang mereka lakukan berbanding lurus dengan benda-benda yang mereka tinggalkan saat ini.

Sistem ekonomi kapitalisme telah menjadi bagian dari kehidupan suku Bajo dewasa ini dengan berbagai dampaknya. Orientasi berdagang suku Bajo saat ini pun tidak sebatas untuk makan dan untung-rugi tetapi sudah memikirkan hal yang jauh kedepan seperti investasi alat tangkap, mesin, perahu, dan biaya produksi.

Dampak dari proses transformasi suku Bajo di Bajo Pulau dalam bidang pendidikan ditandai dengan semakin tingginya rata-rata usia sekolah dan jenjang pendidikan anak-anak. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi sistem usaha yang semula bersifat tradisional dan kekeluargaan menjadi modern serta profesional dengan berbagai pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara kelompok nelayan. Kemudian, lahirnya kelompok pemilik modal yang memperkerjakan atau membiayai para nelayan untuk melaut dengan sistem keuntungan bagi hasil atau diupah per bulan. Dalam bidang politik, mereka mulai mengenal sistem politik kepartaian hal ini terlihat dengan semakin suburnya partisipasi aktif masyarakat dalam prosesi pemilu. Terakhir dalam bidang budaya, masyarakat lebih terbuka, mudah, dan toleran untuk berkomunikasi dengan masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda serta banyaknya proses akulturasi yang terjadi di dalam masyarakat dengan berbagai budaya lain.

#### IV. PENUTUP

Identitas budaya dan sejarah suku Bajo di Bajo Pulau dibentuk dari unsur-unsur budaya Bajo dan Melayu, hal ini bisa ditemui dalam tradisi masyarakat dengan membuat sya'ir dan bersya'ir pada saat melaut. Selain itu, mereka juga sudah mulai akrab dengan berbagai perangkat elektronik yang lebih dahulu dikenal oleh masyarakat daratan (Bima). Pengadopsian teknologi ini menandakan telah terjadinya perpindahan informasi dan pengetahuan budaya masyarakat daratan ke maritim, ditunjukkan dengan semakin konsumtif dan bergantungnya terhadap penggunaan berbagai barang (bergerak dan tidak bergerak). Masyarakat Bajo Pulau juga sudah mulai mengabaikan budaya menangkap ikan yang sesuai dengan tradisi leluhur, sekarang mereka menangkap ikan dengan alat tangkap ilegal seperti bom ikan.

Jika ditarik ke akar sejarah kedatangan suku Bajo di Pulau Sumbawa Besar bisa dipastikan, transformasi ini dikarenakan akses dan kemajuan di bidang navigasi perkapalan serta adanya diaspora pedagang muslim, salah satunya dibantu oleh adanya Peta Bugis Kuno dan Peta Pedagang Portugis (*Itinerario*) yang menguasai rute pelayaran di Nusantara bagian timur. Kedatangan para pedagang muslim dari Nusantara bagian barat ke Sumbawa (Bima) salah satunya yaitu suku Bajo membuka jalan masuknya Islam ke Kerajaan Bima melalui berbagai saluran dan dibantu oleh ekspedisi militer Kesultanan Gowa.

Awal pergeseran pola hidup suku Bajo di Bima dimulai oleh adanya kontak dengan budaya daratan saat Kesultanan Bima menggabungkan diri dengan NKRI pada 22 November 1945. Sejak saat itu keputusan Sultan bersifat mengikat tanpa terkecuali suku Bajo yang tunduk pada otoritas setempat karena penguasa dan rakyat

sama-sama beragama Islam. Jadi, penerimaan keputusan yang bersifat *top-down* bisa diterima oleh suku Bajo. Hegemoni budaya daratan mengakibatkan lunturnya kebudayaan maritim pada generasi muda suku Bajo. Selain itu, kerusakan ekosistem lautan yang disebabkan penangkapan ikan yang eksploitatif dan merusak menurunkan produktivitas sumber daya bahari.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Makalah, Laporan Penelitian, Skripsi, Tesis, dan Jurnal**

- Ardiansyah. 2019. *Tembe Nggoli dalam Pakaian Adat Masyarakat Mbojo Bima* (Studi Unsur-unsur Kebudayaan Islam). Skripsi. Makassar: UIN Alauddin.
- Baskara, Benny. 2011. "Manifestasi Identitas Islam Suku Bajo Dalam Naskah Lontarak Assalenna Bajo" dalam *Jurnal Kawistara* Vol. 1 Nomor 1. hlm. 15-27.
- Ekspedisi Nusantara Jaya Unpad. 2018. *Laporan Hasil Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik: Desa Bajo Pulau*. Sumedang: Universitas Padjadjaran.
- Gobang, A. A. dkk. 2017. "Perkembangan Spasial Hunian Suku Bajo di Kampung Wuring Kota Maumere" dalam *Jurnal Teknik Arsitektur ARTEKS* Vol. 2 Nomor 1. hlm. 1-14.
- Haris, Tawalinuddin. 2006. "Kesultanan Bima di Pulau Sumbawa" dalam *Jurnal WACANA* Vol. 8 Nomor 1. hlm. 17-31.
- Kurais. 2016. *Islamisasi Suku Bajo di Bima* (Suatu Tinjauan Historis). Skripsi. Makassar: UIN Alauddin.
- Muhammad, Syukur. 2007. "Sistem Sosial dan Kepercayaan Suku Bajo" dalam *Jurnal ATTORIGOLONG* Vol. 4 Nomor 1. hlm. 87-96.
- Nufus, Hayatun. 2015. "Duo Bajo di Desa Bajo Pulau Kabupaten Bima (1968-2011)" dalam *Jurnal Pattingalloang* Vol. 1 Nomor 1. hlm. 175-186.
- Uniawati. 2010. "Makna Mantra Melaut Suku Bajo". dalam *Jurnal ATAVISME* Vol. 1 Nomor 13. hlm. 175-186.

### **Buku**

- Achmad, Sri. Wintala. 2016. *Sejarah Kerajaan-kerajaan Besar di Nusantara*. Yogyakarta : Araska Publisher.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Daeng, H. J. 1985. Pesta Persaingan dan Konsep Harga Diri di Flores. Dalam Michael R. Dove (Ed), *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi* (hlm 287-311). Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Handoyo, Eko. dkk. 2015. *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Lapian, Adrian. Bernard. 2017. *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad Ke-16 dan 17*. Depok : Komunitas Bambu.
- Magdoff, Fred. & Foster, John. Bellamy. 2018. *Lingkungan Hidup dan Kapitalisme*. Tangerang Selatan : Marjin Kiri.
- Suseno, Franz. Magnis. 2016. *Etika Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Taufiqurrahman. 2012. *Sejarah Pelabuhan Bima*. Yogyakarta : Ombak.
- Wangke, Humphrey. 2019. Prolog. dalam Humphrey Wangke (Ed), *Diplomasi Indonesia dan Pembangunan Konektivitas Maritim* (1-7). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Warsito, Ronggo. 2017. *Antropologi Budaya*. Yogyakarta : Ombak.

Haerulloh dkk.

### **Internet**

- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015, "Jumlah Individu dengan Kondisi Kesejahteraan sampai dengan 10 Terendah Menurut Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat". Diakses dari <https://ntb.bps.go.id/statictable/2016/12/15/164/jumlah-individu-dengan-kondisi-kesejahteraan-sampai-dengan-10-terendah-menurut-desa-di-provinsi-nusa-tenggara-barat-2015.html> tanggal 16 Juli 2020.
- Bimakini, 2017, "Hari Jadi Bima Wahana Refleksi Perjuangan". Diakses dari <https://www.bimakini.com/2017/07/hari-jadi-bima-wahana-refleksi-perjuangan/> tanggal 17 Juli 2020.
- KBBI daring, 2021, "Sinkretis". Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sinkretis> tanggal 9 April 2021.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 2018, "Hotspot Sampah Laut Indonesia". Diakses dari <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://documents.worldbank.org/curated/en/642751527664372193/pdf/126686-INDONESIA-29-5-2018-14-34-5-SynthesisFullReportAPRILIND.pdf&ved=2ahUKEwiy46XK3o7uAhXBeisKHZsoCFkQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw18g8hY9-F2nlQ6Rofiv6Ri> tanggal 18 Juli 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Indonesia, 2021, "Kekuatan Budaya Lamaholot dalam Pembentukan Karakter dan Identitas Masyarakat Flores Timur di Masa Depan". Diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbali/kekuatan-budaya-lamaholot-dalam-pembentukan-karakter-dan-identitas-masyarakat-flores-timur-di-masa-depan/> tanggal 9 April 2021.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019, "Tembe Nggoli, Salah Satu UMKM Unggulan Bima". Diakses dari <https://www.ntbprov.go.id/post/tembe-nggoli-salah-satu-unggulan-umkm-bima> tanggal 19 Juli 2020.
- The Nature Conservancy, 2019, "Infografik Sunda Kecil". Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/vdokumen.com/amp/infografik-sunda-kecil.html> tanggal 20 Juli 2020.

### **Sumber Lisan/ Informan**

- Sudirman (55 tahun). 2018. Kepala Dusun Bajo Barat. *Wawancara*, Bima, 27 Juli 2018.